

Kepada YTH
Presiden RI
Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono
Di Istana Negara
Jakarta

Perihal : **Pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Permohonan Audiensi**

Salam hormat,

Kami dari para korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM di Indonesia yang selalu melakukan AKSI KAMISAN di depan Istana Negara-Monas, menyayangkan perkembangan sikap di dalam TNI terutama Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang menyatakan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan menjadi ukuran dalam merekomendasikan nama calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Joko Santoso.

Kami sebagai warganegara yang hak-hak Asasi kami dirampas dan belum dikembalikan hingga saat ini, sangat kecewa dengan sikap TNI yang menjauhkan HAM dalam proses kenaikan pangkatan dan menduduki posisi strategis kemiliteran Indonesia. Meskipun hukum dan institusi hukum, seperti Pengadilan dan Kejaksaan Agung, gagal memberikan koreksi terhadap individu-individu dalam TNI (AD) yang melanggar HAM, Kami tetap dan masih ingat betul bagaimana kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh TNI merampas hak kami dan hak keluarga kami yang terbunuh atau dihilangkan.

Kalaupun petinggi-petinggi TNI (AD) masih kebal hukum HAM, kalaupun TNI merasa tidak ada putusan pengadilan yang menetapkan para calon KSAD sebagai pelangar HAM, kami tetap berkayakinan bahwa moralitas tetap harus dikedepankan dalam membangun demokrasi. Demokrasi tidak patut dibangun dengan argumentasi menghindar dari pertanggung jawaban hukum. Demokrasi harus dibangun dari puing-puing kemanusiaan, sebagaimana penderitaan yang kami alami.

Tidak percuma Kejaksaan Agung menolak menindak lanjuti penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM dan tidak percuma Mahkamah Agung memutus bebas semua Jenderal yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran berat HAM. Tujuannya adalah memperlancar promosi Jenderal-Jendral yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa-peristiwa berdarah, seperti dalam kasus Kerusuhan Mei 1998, Trisakti 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999,

Jika bangsa ini mau menjadi bangsa yang besar maka bangsa Indonesia harus berani melakukan koreksi yang jujur dan adil. Termasuk terhadap para petinggi TNI Angkatan Darat. Oleh karenanya kami dari keluarga korban pelanggaran HAM meminta Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono menolak nama-nama yang calonkan, seperti Sjafrie Sjamsudin—yang terlibat dalam kasus Penculikan dan penghilangan aktifis pro demokrasi 1997-1998, Trisakti 1998 dan peristiwa Mei 1998, Agustadi Sasongko P.—yang diduga terlibat dalam operasi-operasi militer di Timor Leste dan Aceh. Kami merekomendasikan Presiden RI memilih perwira-perwira cerdas dan bersih dalam TNI AD untuk menduduki Kepala Staf Angkatan Darat.

Jakarta, 12 Desember 2007
Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK)

Suciwati

Sumarsih

Bejo Untung